



Vol 12, No 2

Oktober 2019

DOI: <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2>

Table of Contents

Artikel Pamator

Potensi Desa Wisata Rende Kabupaten Sumba Timur PDF	
Hadrianus Mula	73-77
Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu PDF	
Galuh Widitya Qomaro, Indria Mawaddah	78-83
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Pemilihan Komoditas (Studi Kasus Pada Tanaman Tembakau dan Padi Di Kabupaten Pamekasan) PDF	
Mardiyah Hayati, Siti Maisaroh	84-92
Pertimbangan Bidang Hukum Mahkamah Agung untuk Memberikan Kepastian Hukum Indonesia PDF	
Candra Maulidi Syahputra	93-99
Pengaruh Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura PDF	
Badrus Soleh Helmi, Khoirul Hidayat, Muhammad Fakhry	100-107
Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan PDF	
Rudi Kurniawan	108-112
Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam PDF	
Fauzin Fauzin	113-121
Perubahan Makna Tanah Warisan Pada Masyarakat Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan PDF	
Suhartono Suhartono, Mutmainnah Mutmainnah	122-127
Komparasi Metode Kalkulasi Nilai Tambah Pada Laporan Keuangan PT. Mayora Indah Tbk. PDF	
Arief Nurdiannova Qurochma	128-132
Liberalisasi Pertanian Versus Kesejahteraan Petani: Upaya Mencari Jalan Tengah PDF	
Achmad Faidy Suja'ie, Nian Riawati	133-139

Liberalisasi Pertanian Versus Kesejahteraan Petani: Upaya Mencari Jalan Tengah

Ach Faidy Suja'ie¹, Nian Riawati²

¹Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Timur

²Universitas Jember

Email: ach.faidy@gmail.com

Naskah diterima 17 September 2019, Revisi 30 September 2019, Terbit 19 Oktober 2019

DOI: <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6288>

Abstract

Agricultural liberalization continued controversy. Intensification of agriculture industry in Indonesia has not been able to welfare of farmers. Thus, the application of agricultural technology is always faced to the welfare of farmers. It reviews the debate both of them by perspective of structuralism to found a positive correlation between them. This condition is to offers an alternative solution for industrial agriculture versus the welfare of farmers.

Keywords: liberalization, industrial agriculture, farmers

PENDAHULUAN

Para pendukung neoliberalisme ekonomi menyakini bahwa globalisasi mampu mendorong kemakmuran (Rianto, 2004). Sebaliknya, kalangan penentangannya, berkeyakinan bahwa globalisasi tidak ada sangkut-pautnya dengan kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial, karena globalisasi hanya didorong kepentingan pertumbuhan dan akumulasi kapital berskala global semata (Fakih, 2004). Perdebatan antara neoliberalisme dengan anti neoliberalisme memang bukan fenomena baru, setidaknya dapat dilacak ketika Karl Marx sekitar satu setengah abad lalu menulis bahwa kapital hanya bisa diakumulasi dengan jalan penindasan (Hiariej, 2004), maupun perdebatan yang terkait pergeseran hubungan antara negara dan pasar, munculnya kekuatan non-negara, perubahan tata kelola ekonomi, reorganisasi kewenangan dan hubungan kekuasaan tata politik dunia, munculnya lembaga multilateral global serta de-teritorialisasi ekonomi politik (Rosamond, 2003), bahkan Kobrin dalam Osland (2003) menggambarkan gerakan anti-globalisasi sebagai *"the canary in the mine"* yang selalu memberikan signal bagi globalisasi. Karena itu, perkembangan kapitalisme dan neoliberalisme sebagai inti ideologi globalisasi akan selalu disertai perlawanan. Hal serupa terjadi dalam

konteks liberalisasi pertanian beras di Indonesia.

Secara umum globalisasi mengacu pada proses ekonomi dari masyarakat yang berbeda menjadi lebih erat terintegrasi (Nilson, 2010) Sedangkan neoliberalisme dapat dipahami sebagai sebuah metode yang dilakukan dengan cara mengurangi hambatan baik tarif dan non-tarif serta mendukung adanya persaingan pasar yang kompetitif dengan hasil akhir kesejahteraan konsumen (Klodt, 2003). Dengan demikian, maka liberalisasi industri pertanian beras merupakan metode pengurangan hambatan-hambatan ekonomi yang menyangkut komponen-komponen utama proses industrialisasi pertanian beras, mulai dari bibit, pupuk, teknologi, obat-obatan bagi hama dan penyakit tanaman, modal kerja maupun tenaga ahli, bahkan produk akhir.

Pendukung liberalisasi pertanian berkeyakinan bahwa, penerapan teknologi pada sektor pertanian beras akan mampu meningkatkan produksi beras secara besar-besaran dalam waktu singkat, sebagai jawaban atas semakin meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat dunia (Purokayo dan Umaru, 2012). Disisi lainnya, justru para kritikusnya menganggap liberalisasi pertanian di Indonesia merupakan kegagalan dari proses pembangunan ekonomi yang ditandai dengan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam

penataan agraria (Wahono, 2003). Ketimpangan yang akan mendatangkan konflik sosial, serta semakin menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Dengan demikian, kedua konsep tersebut - industrialisasi pertanian dan kesejahteraan petani- tidak dapat saling menopang satu sama lain, justru keduanya merupakan dua hal yang saling menegasikan.

Argumen pokok yang ingin dibangun dalam artikel ini, bahwa terdapat korelasi yang kuat antara keduanya. Idealnya, penerapan teknologi (industrialisasi) dalam sektor pertanian, akan dapat meningkatkan produksi pertanian beras, karena intervensi teknologi akan berimplikasi positif bagi pengelolaan pertanian tradisional. Implikasi berikutnya terjadi peningkatan kesejahteraan petani karena terjadi peningkatan produksi pertanian.

Dengan menggunakan prseptif strukturalisme, tulisan ini menawarkan jalan tengah bagi industri pertanian yang dapat menyejahterakan petani dalam waktu bersamaan. Tulisan dibagi menjadi tiga. Bagian pertama memetakan perdebatan globalisasi dan liberalisasi pertanian. Bagian kedua mendeskripsikan kesejahteraan petani. Bagian terakhir mendiskusikan jalan tengah bagi industri pertanian yang mampu menyejahterakan petani.

GLOBALISASI DAN LIBERALISASI INDUSTRI PERTANIAN

Teori ekonomi klasik dan neo-klasik menunjukkan bahwa perdagangan akan mendatangkan keuntungan ekonomi substansial melalui alokasi yang lebih efisien dari sumber daya dan terjadinya spesialisasi. Sementara, banyak teori mengatakan bahwa keuntungan dari aktivitas pasar diperoleh dari eksploitasi keunggulan komparatif, ruang lingkup pasar yang lebih besar yang memungkinkan pembagian kerja lebih luas melintasi batas-batas negara (akses pada input lebih murah, lebih banyak memunculkan kreativitas dan produktivitas) akan dapat meningkatkan keuntungan lebih besar (Levy, 2009). Berdasar asumsi ini, peningkatan produktivitas akan dicapai dengan perluasan pasar, melintasi batas negara, serta adanya spesialisasi dan kompetisi antar negara. Dengan demikian, produktivitas harus diletakkan pada ruang

globalisasi yang sering dimaknai sebagai dunia yang tanpa batas, melintasi negara-bangsa, dan pemerintahan yang tidak lagi memegang kendali (Henderson, 2002).

Pada dasarnya, Globalisasi merupakan perkembangan kapitalisme, yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan perusahaan transnasional (TNCs/ *Trans National Corporations*) dengan dukungan lembaga-lembaga finansial internasional (*IFIs/International Financial Institutions*) yang diatur oleh organisasi perdagangan global (*WTO/World Trade Organization*) (Faqih, 2004), dengan inti dan kiprah globalisasi adalah neoliberalisme (Wibowo, 2003).

Liberalisasi sektor pertanian, dapat dimengerti sebagai bentuk “keterbukaan” dalam fenomena “transnasionalisasi” ekonomi, menyangkut komponen-komponen utama proses industri pertanian, mulai dari bibit, pupuk, teknologi, obat-obatan untuk hama dan penyakit tanaman, modal kerja, bantuan tenaga ahli sampai dengan produk akhir (Wiryono, 2003). Sehingga, liberalisasi pertanian memastikan terjadinya persaingan petani lokal dengan kekuatan asing yang tidak terkendali, petani dengan perusahaan multinasional (MNEs), karena sepertiga dari perdagangan internasional terjadi dalam perusahaan transnasional (Stiglitz, 2002), dengan kecenderungan MNEs sebagai aktor utama globalisasi atau agen utama dalam integrasi ekonomi (Zimmerer, 2007), dominasi tersebut dimulai dari penyediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan, sampai dengan produk akhir pengolahan pasca panen.

Relasi tersebut dapat dipahami dengan perspektif strukturalis, paradigma yang diilhami oleh pemikiran “Marx Tua” setelah terjadinya perpecahan epistemologis pemikiran Marx, disamping pengaruh Weber. Paradigma ini memusatkan perhatian pada pola hubungan struktural yang terdapat dalam kenyataan sosial yang nyata. Dalam perkembangannya, penganut paradigma ini dapat dibedakan pada dua arus pemikiran, sebagian kalangan menaruh perhatian pada adanya perbedaan kekuatan sosial serta hubungan antar kekuatan sosial untuk menjelaskan perubahan sosial, dan sebagian lainnya lebih tertarik pada pertentangan dalam suatu masyarakat (Fakih, 2011).

Melalui pendekatan ini, maka implikasi hadirnya perusahaan multinasional dalam industri pertanian telah menimbulkan monopoli, dominasi yang merugikan petani. Dominasi dan monopoli MNEs ini menggunakan strateginya pemberian bantuan modal, penerapan teknologi, penyediaan bibit, pupuk, dan bahkan monopoli pembelian produk akhir pertanian. Sebagaimana dicontohkan Shiva (1997) bahwa satu-satunya alasan mengapa tanaman direayasa secara genetik oleh korporasi, adalah supaya benihnya dapat dipatenkan, dengan demikian MNEs dapat meraup keuntungan dari royalti atas kekayaan intelektual. Sehingga, industri pertanian hanya menjadi lahan akumulasi kapital bagi pengusaha besar dan MNEs, sedang petani kecil hanya menjadi pihak yang terus dirugikan. Kondisi tidak menguntungkan bagi petani kecil akan semakin kentara dan parah, ketika kekuatan MNEs ternyata didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, *Food and Agriculture Organization* (FAO), *United States Departement of Agriculture* (USDA), serta lembaga-lembaga riset internasional sebagai aparatus pendukung dalam menemukan teknologi baru bidang pertanian.

Hal tersebut dapat dikonfirmasi pada pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia, Pada dekade 1970-an, Indonesia masih mengimpor 1,5 juta ton beras per tahun. Kemudian pada awal-awal penerapan teknologi di sektor pertanian, pada tahun 1985 Indonesia mampu mengekspor 1,5 juta ton beras. Antara tahun 1968 sampai 1984, produksi beras meningkat rata-rata sekitar 5 % per tahun (Esje dan Daniel, 1998). Namun, setelah 40 tahun lebih diterapkannya revolusi hijau di Indonesia, target swasembada pangan tidak lagi tercapai setelah 4 tahun berturut-turut (1985-1988), swasembada kembali tercapai pada tahun 1990. Selain, pada tahun 1985, surplus (nilai ekspor -1%), kembali terjadi pada tahun 1993. Setelah itu, swasembada tidak pernah terjadi lagi, bahkan nilai persentase impor terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1994, impor beras Indonesia masih 2% dari total suplai 28,58 juta ton, akan tetapi tahun berikutnya sudah berlipat tiga menjadi 6% dari total suplai atau 1,8 ton, dan terus mengalami peningkatan, baik itu persentase

maupun volumennya pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 9% dari total suplai atau 2,9 ton pada tahun 1998 (Wahono, 2003)

Selain itu, berdasarkan data BPS, kenaikan produktivitas lahan sawah di Jawa, sejak dekade 1980-an, telah menunjukkan pelandaian (*levelling off*). Padahal, data BPS pada periode tahun 1980 sampai 1991, menunjukkan bahwa konsumsi pupuk terus meningkat. Gejala penurunan produktivitas lahan ini menunjukkan adanya penurunan efisiensi penggunaan (penyerapan) pupuk di mana tingkat kenaikan produksi per satuan pupuk yang digunakan (ditambahkan) makin menurun. Penggunaan pupuk kimia yang berlebih dan secara terus-menerus merupakan faktor penyebab utama merosotnya produktivitas lahan sawah di Jawa (Esje dan Daniel, 1998), penurunan produktivitas hasil pertanian –khususnya padi- sebagian juga disebabkan adanya program alih fungsi lahan, dari fungsi pertanian ke non-pertanian (perumahan, perkantoran, industri non-pertanian, dll) yang terjadi secara besar-besaran.

Dengan demikian, dalam perspektif strukturalis, industri pertanian telah menimbulkan pelandaian lahan akibat pupuk kimia, kerugian petani akibat dominasi dan monopoli yang terus meminggirkan petani pada urusan biaya produksi pertanian, terjadi ketimpangan kepemilikan lahan, serta kesenjangan antara petani besar dan kecil. Hal tersebut terjadi akibat ketimpangan struktur antara MNEs yang didukung lembaga keuangan dan riset internasional sebagai struktur sosial yang dominatif dan eksploitatif dengan petani yang masih lemah.

KESEJAHTERAAN PETANI

Liberalisasi pertanian memang telah membawa hasil terhadap peningkatan produksi beras nasional, namun hal itu tidak berdampak pada kesejahteraan petani. Idealnya, ketika industri pertanian bertujuan meningkatkan produksi, maka petani juga harus menjadi bagian dari tujuan tersebut, menjadi objek yang harus ditingkatkan produktivitasnya. Realitanya, berbagai usaha yang dilakukan pemerintah sepanjang dekade tahun 1950 sampai tahun 1970-an, yang difokuskan untuk mengatasi pola tingkah laku ekonomi “enggan” maju dalam

produksi dari masyarakat petani, menjadi “suka” atau maju memproduksi dilakukan dengan berbagai kepingan kebijaksanaan dari berbagai arah dengan anak panah revolusi hijau, menggunakan aparatus negara untuk menekan petani dengan ancaman sanksi-sanksi sosial, belum mampu mendorong kesejahteraan petani (Nugrahedhi, 2002), industri pertanian belum berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan petani. Setidaknya dapat dilihat pada dua hal:

a. Pendapatan Petani

Penerapan teknologi atau kemudian dikenal dengan revolusi hijau di Indonesia menggunakan strategi penerapan teknologi, baik berupa asupan bibit unggul, asupan pupuk, insektisida, dan lain sebagainya. Secara logis, dalam perspektif ekonomi, pertanian modern membutuhkan lebih banyak faktor produksi, membutuhkan lebih banyak investasi, memerlukan lebih banyak modal dibandingkan pertanian tradisional yang memanfaatkan alam sebagai modal utama, seperti pupuk kandang, cacing yang memang bersarang ditanah, serta beberapa makhluk hidup lain yang mendukung suksesnya pertanian. Oleh karena itulah, biaya yang harus dikeluarkan petani modern akan semakin besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan petani tradisional. Dengan demikian, bertambahnya penghasilan tidak akan berpengaruh positif kepada pendapatan petani modern, karena bertambahnya produksi pertanian justru akan habis dikurangi ongkos produksi pertanian.

Data BPS (dalam Afandi, 2001) menunjukkan bahwa, total jumlah penghasilan yang diterima petani di pulau Jawa hanya sebesar Rp. 1.462.683/ha – biaya Rp. 552.157/ha = pendapatan petani sebesar Rp. 910.679/ha. Sedangkan rata-rata pendapatan petani Indonesia hanya berkisar Rp. 821.504/ha, angka tersebut didapatkan dari hasil pengurangan penghasilan sebesar Rp. 1.247.271/ha – biaya sebesar Rp. 425.767/ha. Husodo (dalam Jamal, Syahyuti, dan Harun, 2002: 137) mengatakan bahwa biaya usaha tani sangat beragam, mulai dari Rp. 382.000/ha/musim sampai dengan Rp. Rp. 1.044.000/ha/musim, dengan komponen terbesar (sekitar 64,20%) adalah biaya tenaga kerja, dengan besarnya

biaya tersebut pertanian sudah tidak menguntungkan lagi bagi petani.

Tulisan ini memang tidak dapat memuat biaya sebelum diterapkannya pertanian modern dengan biaya pasca diterapkannya pertanian modern, sehingga, data tidak dapat diperbandingkan secara proporsional. Namun, secara logis dapat disimpulkan banyak pertanian tradisional dengan ke-tradisional-nya dapat dipastikan hanya akan membutuhkan sedikit biaya dibandingkan dengan pertanian modern. Benar bahwa sedikitnya biaya yang dikeluarkan pada pertanian tradisional berkonsekuensi pada rendahnya produksi atau rendahnya penghasilan, sehingga rendah pula pendapatan yang didapat oleh petani. Namun, tingginya pendapatan pada pertanian modern justru habis dikurangi biaya produksi.

Dalam konteks ini, titik tekan data dimaksudkan untuk mengeliminasi pernyataan-pernyataan keberhasilan industri pertanian yang hanya ditumpukan kepada pertumbuhan atau kenaikan produksi pertanian, tanpa diimbangi dengan data-data biaya yang harus dikeluarkan petani. Adalah benar, revolusi hijau telah membebaskan petani dari perangkap involusi pertanian, tetapi disini lain, tidaklah benar bahwa pembebasan itu dengan sendirinya telah menyejahterakan petani, justru telah melemparkan sebagian besar petani miskin lahan ke arena pergulatan yang lebih dahsyat, asupan kimiawi yang tidak terkendali serta pola tanam monokultur yang dominan telah menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemiskinan keanekaragaman hayati, terutama dengan lepasnya keragaman bibit padi lokal dari tangan petani ke tangan korporasi transnasional serta menyusutnya jumlah predator hama tanaman khususnya padi (Nugrahedhi, 2002).

b. Nilai Tukar Petani

Selain berkaitan dengan rendahnya pendapatan, petani harus dihadapkan dengan nilai tukar. Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Berdasarkan nilai tukar petani ditemukan bahwa peningkatan produksi industri pertanian belum berimplikasi pada peningkatan taraf hidup petani, bahwa nilai

tukar petani masih sangat rendah, bahkan di beberapa propinsi di Indonesia nilai tukar petani masih berada dibawah angka 100 (Nugrahedi, 2002).

Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa nilai tukar hasil pertanian masih lebih rendah dari barang non pertanian, sehingga dengan hasil pertanian, petani tidak mampu untuk membeli barang-barang kebutuhan mereka sendiri, artinya petani merugi oleh usahanya sendiri. Neoliberalisasi yang ditandai meningkatnya interaksi global, budaya, pertumbuhan perusahaan transnasional (TNCs), serta mobilitas pekerja (Tsai, 2007) telah membuka ruang bagi perusahaan multinasional untuk semakin mengonsolidasikan operasi kerja globalnya dalam pasar dunia yang semakin dideregulasikan, untuk mempertinggi mobilitas dan keuntungan bagi TNCs (Syeirazi, 2003) salah satunya dengan mekanisme harga. Hal tersebut relevan dengan efek negatif globalisasi yang menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi pekerja anak, menimbulkan kesenjangan, orang kaya semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin, "diambil alih" industri lokal oleh perusahaan multinasional, serta terjadinya kenaikan harga yang menyebabkan gagalnya upaya kesejahteraan rakyat (Pourhassan, 2010).

Selain itu, posisi petani semakin terpuruk ketika pembangunan tidak menjadikan pertanian sebagai prioritas, sehingga kontribusi pertanian masih sangat rendah. Seperti yang ditunjukkan Mukhyi (2007) dari hasil penelitiannya di Propinsi Jawa Barat, bahwa kontribusi sektor pertanian di Jawa Barat masih bersifat tradisional, kondisi ini memerlukan dukungan, dorongan dan upaya-upaya dari pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor unggulan.

TAWARAN SOLUSI JALAN TENGAH

Dari berbagai problem liberalisasi pertanian yang teridentifikasi dalam perspektif struktural tersebut, tulisan ini menawarkan solusi yang mengkorelasikan industrialisasi pertanian dengan kesejahteraan petani.

a. *Land reform*

Secara historis, *land reform* berarti reformasi sistem penguasaan tanah atau

redistribusi hak-hak kepemilikan tanah. Konsep *land reform* telah dikembangkan menjadi suatu ketentuan mengenai peran strategis tanah dan pertanian dalam pembangunan. *Land reform* telah menjadi sinonim dari *agraria reform* atau suatu upaya untuk memperbaiki struktur agraria, yang terdiri atas; sistem penguasaan tanah, metode penggarapan tanah dan organisasi pertanian, skala operasi pertanian, sewa menyewa, institusi kredit desa, pemasaran, dan pendidikan (Tuma, 2001).

Ketidakadilan dalam akses, penguasaan dan pemanfaatan tanah merupakan faktor penghambat utama bagi pembangunan pedesaan dan peningkatan kesejahteraan petani (Mauludin, 2001). Dengan demikian, *land reform* merupakan jalan menuju reformasi agraria yang lebih memberikan jaminan keadilan dalam rangka mengatasi kemiskinan di pedesaan. Pada banyak negara-negara berkembang yang ingin membangun perekonomiannya, tidak jarang memulainya dengan mengadakan *land reform*. Kadang-kadang *land reform* dilakukan secara radikal, kadang pula dengan lunak dan berangsur-angsur dan adakalanya hanya diadakan percobaan-percobaan saja. Tetapi, apapun bentuk *land reform* yang dipilih, yang jelas tersepakati adalah tentang keharusan perombakan struktur penguasaan tanah untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi nasional.

Melalui program ini, diharapkan problem industri pertanian yang salah satunya adalah adanya ketimpangan kepemilikan lahan pertanian, yang mengakibatkan rendahnya pendapatan petani dapat diatasi. Dengan demikian, terselesaikannya masalah ketimpangan kepemilikan akan berpengaruh pada hilangnya ketimpangan pendapatan, dan implikasi selanjutnya, peningkatan produksi pertanian dapat dinikmati secara adil oleh petani, tanpa membedakan petani gurem dan petani "besar", terjadi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bersama.

b. *Pertanian Sensitif Lingkungan*

Dalam pandangan Shiva (1997) hubungan antara manusia dengan alam merupakan hubungan yang hidup dan saling memelihara. Oleh karena itu, pola hubungan manusia dengan alam harus merupakan perwujudan dari feminin khas Prakriti, yaitu: kreativitas, aktivitas, dan produktivitas;

keanekaragaman bentuk dan aspek; keterkaitan dan saling berhubungan antar setiap makhluk; kesinambungan antara alam dan manusia; serta kesucian kehidupan di dunia. Hal ini berkebalikan dengan pandangan kaum developmentalis yang memosisikan alam sebagai lingkungan, sebagai sumber daya, sehingga manusia mendominasi alam.

Penerapan paradigma ini pada industri pertanian tentu akan berimplikasi pada kuantitas penggunaan asupan kimiawi sebagaimana dianjurkan oleh paradigma liberal, meskipun tidak serta merta semua asupan kimiawi ditinggalkan, namun, meninggalkan praktek-praktek tradisional yang lebih sensitif terhadap lingkungan tentu juga tidak bijak. Oleh karena itu, untuk mengurangi beberapa efek negatif dari penggunaan asupan kimiawi, maka praktek pada pertanian tradisional perlu diadopsi kedalam industri pertanian, dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas industri pertanian. Dengan demikian, maka implikasi negatif pertanian modern, seperti mempeburuk kesehatan, maupun merusak kesuburan tanah tanah akan dapat ditekan, dan di sisi lain, kebutuhan petani akan tetap terpenuhi dengan cara meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Kolaborasi penerapan model pertanian modern dan tradisional, yang satu bertumpu pada teknologi, dan yang lainnya bertumpu pada alam, merupakan alternatif jalan tengah, bagi upaya terus meningkatkan produktivitas pertanian serta melestarikan lingkungan. Dengan demikian, kesehatan, kesuburan tanah, menjadi hal yang inheren dengan peningkatan produktivitas pertanian yang dapat mendatangkan kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. 2001. *Tragedi Petani: "Musibah" Panen Raya Padi 2000*. Lembaga Analisis Informasi. Yogyakarta
- Esje, G. & Daniel. 1998. *"Menggugat Revolusi Hijau Orde Baru"*. Jurnal Wacana. No. 12, Juli-Agustus 1998: 1-5.
- Fakih, M. 2004. *Neoliberalisme Dan Globalisasi*. Jurnal Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär. Edisi I 2004: 1-12.
- Fakih, M. 2011. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Cetakan ke VII. Pustaka Pelajar dan Insist Press. Yogyakarta
- Henderson, J. 2002. *Globalization on the ground: Global production networks, competition, regulation and economic development*. Paper for Centre for Regulation and Competition International Workshop, 4-6 September 2002. IDPM, University of Manchester.
- Hiariej, E. (2004). *"Gerakan Anti Kapitalisme Global"*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 8, Nomor 2, Nopember 2004: 139-160
- Jamal, E., Syahyuti., Harun, M. Aten. 2002. *"Reforma Agraria dan Masa Depan Pertanian"*. Jurnal Litbang Pertanian. Vol. 21, No. 4, 2002: 133-139
- Kasiyanto, M.J. (1996). *Maju tapi Miskin: Paradoks Kesuksesan Pembangunan Pertanian*. Jurnal Basis, No. 1-2 Januari-Februari 1996.
- Klodt, H. 2003. *Jalan Menuju Tatanan Persaingan Global*, disunting oleh Institut Liberal Friedrich-Naumann-Stiftung. Volume 10
- Levy, B. 2009. *New Frontiers in Globalization, Asian Emerging Countries and Governance Issues in the 21st Century*. Jurnal Competition Forum Vol. 7, No. 1: 243-256.
- Mauludin. 2001. *"Tanah Yang Bernanah: Gerakan Petani Menanti Bumi Surgawi"*, dalam Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi, Jurnal Gerbang. The Asia Foundation (TAF) dan eLSAD. Vol. IV, No. 9, 2001: 2-40
- Mukhy, A & Mohammad. 2007. Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat:

- Pendekatan Analisis IRIO. Paper disampaikan pada Simposium Nasional RAPI VI, 2007.
- Nilson, T. 2010. *Good for Living? On the Relationship between Globalization and Life Expectancy*, dalam *World Development*. Vol. 38, No. 9, 2010: 1191–1203.
- Nugrahedi, R & Probo Y. 2002. *Petani dan Beras di Balik "Sukses" Pembangunan Pertanian*, dalam *Mengurai belitan Krisis: Renungan Dari Bendan Dhuwur*. Budi Widianarko dan Andreas Pandiangan (Eds). Penerbit Kanisius dan Universitas Soegijapranata. Yogyakarta.
- Osland, S.J. 2003. *Broadening the Debate The Pros and Cons of Globalization*. dalam *Journal of Management Inquiry*. Vol. 12, No. 2, June 2003: 137-154. Sage Publication.
- Pourhassan, Abbas. 2010. *"Can Policy Be The Same In Localization And Globalization? Issues And Perspectives*. *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*. Vol 2, No. 3, July 2010: 1545-1550. Diakses melalui ijcrb.webs.com
- Purokayo, G. S. & Umaru, A. 2012. *Global Food Crisis: Public Capital Expenditure and Agricultural Output in Nigeria*. *Journal of Food Research*, Vol. 1, No. 1, February 2012: 286-297. Diakses melalui www.ccsenet.org/jfr
- Rianto, P. 2004. *Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi dan Krisis Demokrasi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8, Nomor 2, Nopember 2004: 161-180.
- Rosamond, Ben. 2003. *Babylon and on? Globalization and international political economy*. *Review of International Political Economy*. Vol. 10, No. 4, November 2003: 661-671. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/4177481>.
- Rugman, M.A. 2010. *Globalization, regional multinationals and Asian economic development*. *Asian Business & Management*. Vol. 9, No. 3: 299–317.
- Diakses melalui www.palgrave-journals.com/abm/.
- Shiva, V. 1997. *Bebas Dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Stiglitz, J. 2002. *Globalization and its Discontents*. W.W.Norton. London
- Syeirazi, K.M. 2003. *Dilema Praktis Globalisasi Neoliberal*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 7, Nomor 1, Juli 2003: 1-34.
- Tsai, Ming-Chang. 2012. *Does Globalization Affect Human Well-Being*. *Social Indicators Research*, Vol. 81, No. 1, March 2007: 103-126. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/20734416>.
- Tuma, E.H 2001. *"Land Reform"*, dalam *Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi*. *Jurnal Gerbang*. The Asia Foundation (TAF) dan eLSAD. Vol. IV, No. 9, 2001: 62-85.
- Wahono, F. 2003. *"Revolusi Hijau: Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi"*, dalam *Neoliberalisasi*, I. Wibowo dan Francis Wahono (eds). Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta
- Wibowo, I. 2003. *Pendahuluan dalam Neoliberalisasi*, I. Wibowo dan Francis Wahono (eds). Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta:
- Wiryo, P. 2003. *Neoliberalisme dalam Sektor Industri Pangan*. *Neoliberalisasi*, I. Wibowo dan Francis Wahono (eds). Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta.
- Zimmerer, S.K. 2007. *Agriculture, livelihoods, and globalization: The analysis of new trajectories (and avoidance of just-so stories) of human-environment change and conservation*. *Agriculture and Human Values*. Vol. 24: 9–16.

